

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara universal, manusia mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan dan mengemban titah-titah amanat-Nya serta memperoleh kasih sayang-Nya yang sempurna.¹ Sebagai wujud kesempurnaannya, manusia diciptakan oleh Allah setidaknya memiliki dua tugas dan tanggung jawab besar. *Pertama*, sebagai seorang hamba (*'abd Allāh*),² yang berkewajiban untuk memperbanyak ibadah kepada-Nya sebagai bentuk tanggung jawab *'ubūdiyyah* terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. *Kedua*, sebagai *khalīfatullāh* yang memiliki jabatan *ilahiyah* sebagai pengganti Allah dalam mengurus seluruh alam.³ Dengan kata lain, manusia sebagai *khalīfah* berkewajiban untuk menciptakan kedamaian, melakukan perbaikan, dan tidak membuat kerusakan, baik untuk dirinya maupun untuk makhluk yang lain.⁴

Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada di langit dan di bumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi untuk mengingkarinya. Hal ini sebagaimana firman Allah:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh"*⁵

¹ Rachmat Ramadhana al-Banjari, *Prophetic Leadership* (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), hlm. 21.

² QS. Az-Zāriyat [51] : 56.

³ QS. Al-Baqarah [2] : 30

⁴ QS. Al-A'raf [7] : 56

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1990, hlm. 367

Ibn 'Abbās sebagaimana dikutip oleh Ibn Kašīr dalam tafsirnya "*Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanat pada ayat di atas adalah ketaatan dan penghambaan atau ketekunan beribadah.⁶ Ada juga yang memaknai kata amanah sebagai *at-Taklīf* atau pembebanan, karena orang yang tidak sanggup memenuhinya berarti membuat utang atas dirinya. Adapun orang yang melaksanakannya akan memperoleh kemuliaan.⁷

Dari sekian banyak penafsiran ulama tentang amanah, dapat ditarik sebuah "benang merah" yang dapat menghubungkan antara satu dengan yang lain, yaitu *al-Mas'ūliyyah* (tanggung jawab) atas anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia, baik berupa jabatan maupun nikmat yang sedemikian banyak. Dengan kata lain, manusia berkewajiban untuk menyampaikan "laporan pertanggungjawaban" di hadapan Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepadanya. Hal ini juga berarti bahwa pemimpin bukan hanya orang yang memiliki jabatan organisasi/ instansi dan atau lembaga tertentu tetapi setiap manusia adalah pemimpin dalam skala paling kecil. Hanya saja, sejak dahulu banyak orang yang berpendirian bahwa kepemimpinan itu tidak dapat dipelajari. Sebab kepemimpinan adalah suatu bakat yang diperoleh sebagai kemampuan istimewa yang dibawa sejak lahir. Jadi, sebagian orang mengatakan bahwa memang tidak ada dan tidak diperlukan teori kepemimpinan. Suksesnya kepemimpinan itu disebabkan oleh keberuntungan seorang pemimpin yang memiliki bakat alami yang luar biasa, sehingga ia memiliki kharisma dan kewibawaan untuk memimpin massa yang ada di sekitarnya.

Dalam perkembangannya, pemikiran tersebut secara lambat laun tergeser dengan pemikiran bahwa kepemimpinan itu terjadi secara ilmiah bersamaan dengan pertumbuhan/managemen ilmiah yang dipelopori oleh seorang ilmuwan

⁶ 'Imād ad-Dīn Abū al-Fidā' Ismā'il ibn Kašīr ad-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, jilid. XI (Kairo: Mu'assasah Qurṭubah, 2000), hlm. 250

⁷ Kaitannya dengan hal tersebut, Abdullah Yusuf Ali menyatakan bahwa kata-kata langit, bumi, dan gunung-gunung pada ayat tersebut mengandung makna simbolik. Maksudnya, untuk membayangkan bahwa amanah itu sedemikian berat sehingga benda-benda yang sedemikian berat seperti langit, bumi, dan gunung yang cukup kuat serta teguh sekalipun, tidak sanggup menanggung dan memikulnya. Lihat Sahabuddin.et.al, *Ensklopedi al-Qur'an; Kajian Kosakata*, jilid. I (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 83-84.

Frederick W. Taylor pada awal abad ke-20 yang kemudian hari berkembang menjadi satu disiplin ilmu.⁸

Kajian tentang hadis kepemimpinan Quraisy adalah topik kajian yang cukup intens dikalangan ulama dari zaman ke zaman. Para ulama hampir tidak pernah melewatkan untuk memberikan respon dan interpretasi, utamanya dalam kaitan sebagai salah satu syarat kekhalifahan. Tampaknya intensitas perhatian ulama dalam melakukan interpretasi dikarenakan adanya isu krusial disekitar hadis tersebut.⁹

Untuk masa yang cukup lama, sebagian besar ulama cenderung kepada interpretasi bahwa khalifah haruslah dari suku Quraisy.¹⁰ Bahkan ada yang mengemukakan telah terjadi kesepakatan bahwa kekhalifahan di kalangan Sunni harus berasal dari kalangan Quraisy.¹¹ Interpretasi tersebut menjadi sandaran legitimasi dan pegangan para penguasa serta umat islam untuk masa yang cukup panjang. Sementara itu, di awal masa islam, Khawarij tidak mengakui syarat khalifah harus dari keturunan Quraisy. Bagi mereka, masalah ini berkaitan dengan kemaslahatan umat dan karena itu bukanlah hak monopoli suku tertentu. Siapapun menurut mereka, apakah ia keturunan Quraisy atau bukan, apakah ia orang Arab atau bukan, boleh menjadi khalifah selama ia mempunyai kemampuan memegang jabatan tersebut.¹² Sejalan dengan kelompok ini adalah Muktazilah yang bagi mereka jabatan kepala negara boleh diduduki selain dari suku Quraisy.¹³ Berbeda dengan Khawarij dan Muktazilah, kaum Syi'ah justru mensyaratkan *Ahl al-Bait* (keturunan Nabi Muhammad saw. melalui jalur 'Ali dan Fathimah). Sehingga menurut

⁸ Kartono Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Cet. VIII, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 47.

⁹ Ahmad Khairuddin, *Beberapa Interpretasi Hadis al-Aimmah Min Quraisy: Studi Hadis dengan Pendekatan Fiqh Siyasah* (Banjarmasin: Antasari Press, 2005), hlm.2

¹⁰ Ann K.S. Lambton, *State and Government in Medieval Islam* (London: Oxford University Press, 1981), hlm. 79

¹¹ *Ibid.*, hlm. 80

¹² Ahmad Amin, *□Duha al-Islam III* (Kairo: Maktabat al-Nahdlah al-Mishriyyah, 1963), hlm. 332

¹³ Suryadi *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), hlm. 165.

mereka *Ahl al-Bait*-lah yang secara praktis berhak atas jabatan khalifah tersebut.¹⁴

Hadis atau disebut juga dengan sunnah,¹⁵ yang merupakan sumber ajaran islam setelah al-Qur'an telah menjadi *hujjah* (sumber otoritas) keagamaan ummat islam pada masa Nabi Muhammad saw. dan para generasai dibawahnya, yang diikuti dengan mengamalkan isinya dengan penuh semangat, kepatuhan dan ketulusan.¹⁶ Meskipun hadis Nabi merupakan sumber pokok kedua setelah al-Qur'an,¹⁷ namun demikian, ditinjau dari sejarah periwayatannya, hadis Nabi berbeda dengan al-Qur'an. Untuk al-Qur'an, semua periwayatan ayat-ayatnya berlangsung secara *mutawātir*, sedangkan hadis Nabi, sebagian periwayatannya berlangsung secara

¹⁴ Ayatullah Sayyid Muhammad al-Musawi, *Mazhab Syi'ah Kajian al-Qur'an dan Sunnah* Terj. Tim Muṭahhari Press (Bandung: Muṭahhari Press, 2001), hlm. 52, 122, dan 190.

¹⁵ Dalam uraian ini, istilah Hadis disamakan pengertiannya dengan istilah Sunnah sebagaimana dinyatakan ulama hadis *muta'akhhirīn* pada umumnya. Karena dari sudut terminologi, Menurut mereka, hadis atau sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat beliau, dan sifat ini baik berupa sifat fisik, moral, maupun perilaku, sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya. Lihat, Agus Sholahuddin dan Agus Suyadi, *Ulūmul Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 19. Menurut ulama *mutaqaddimīn*, dan sebagian ulama, *term* hadis dan sunnah mempunyai pengertian yang berbeda. Sebagian mengartikan sunnah sebagai segala sesuatu yang diambil dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat fisik dan non fisik ataupun hal ihwal Nabi sebelum diutus menjadi Rasul, seperti *tahannus* di Gua hira, maupun hal ihwal Nabi setelah menjadi Rasul. Lihat Subhi as-Ṣalih, *Ulūm al-Hadīs wa Muṣṭolahuh* (Beirut: Dār al-'Ilm lī al-Malāyin, 1988), hlm. 3-5. Sebahagian ulama ada yang membedakan antara hadis dan sunnah, dari aspek kualitas *amaliyah* dan periwayatannya. Jika hadis merupakan berita tentang suatu peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., yang meskipun mungkin hanya sekali saja beliau mengerjakannya dan walaupun hanya diriwayatkan oleh seorang saja. Sedangkan Sunnah, merupakan suatu *amaliyah* yang terus-menerus dilaksanakan oleh Nabi saw., beserta para sahabatnya, kemudian seterusnya diamalkan oleh generasi-generasi berikutnya sampai kepada kita. Lihat M. Alfatih Suryadilaga, *Ulūmul Hadis* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010), hlm. 28. Sedangkan menurut Fazlur Rahman, sunnah mempunyai pengertian yang berbeda dengan hadis. Sunnah, menurutnya adalah transmisi non verbal, sementara hadis adalah transmisi verbal. Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm. 68-75

¹⁶ Erfan Soebahar, *Menguak Fakta Keabsahan Al Sunnah: Kritik Muṣṭofa al-Siba'i terhadap Pemikiran Ahmad Amin Mengenai Hadīs dalam Fajr al-Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 3.

¹⁷ Penempatan urutan sumber pokok ajaran islam dalam beberapa literature tidak seragam. Urutan kronologis ini jika terjadi jika Hadis dan Sunnah diartikan sama, namun ketika dilakukan pemisahan, maka urutan kronologisnya menjadi al-Qur'an, Sunnah, dan Hadīs. Lihat M. Alfatih Suryadilaga, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 27. Selain itu, Hadis, disamping disebut sumber pokok kedua setelah al Qur'an, atau sumber pokok ajaran setelah al Qur'an, juga disebutkan sebagai sumber pokok ajaran disamping al Qur'an. Penyebutan ini lebih melihat hadis sebagai sumber ajaran yang berkedudukan penting dilihat dari interaksinya dengan al Qur'an sebagai sumber ajaran pertama. Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadīs* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 3

mutawātir, dan sebagian lagi berlangsung secara *ahad*.¹⁸ Karenanya, al-Qur'an dari segi periwayatannya berkedudukan sebagai *qaṭ'iy al-wurūd*, sehingga tidak diperlukan penelitian tentang orisinalitasnya. Berbeda dengan hadis Nabi, sebagian berkedudukan *qaṭ'iy al-wurūd*, dan sebagian lagi, bahkan yang terbanyak, berkedudukan sebagai *zanniy al-wurūd*.¹⁹

Perbedaan model transmisi dan kedudukan antara al-Qur'an dan hadis ini menjadikan hadis mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan para ulama, terlebih dalam upaya memahami hadis-hadis yang tampak bertentangan. Pada masa awal, perhatian ulama masih difokuskan pada pembahasan mengenai kriteria kesahihan hadis dengan lebih menitik bertkan pada penelitian sanad. Baru, sejalan dengan pesatnya perkembangana ilmu pengetahuan dalam berbagai diskursus akhir-akhir ini, sering diangkat tema sekitar pemahaman atau pemaknaan terhadap teks-teks keagamaan, terutama diskursus mengenai pemahaman hadis. Yusuf Qardhawi misalnya, telah meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam berinteraksi dengan hadis Nabi dan mulai membedakan antara wilayah hadis yang dapat dipahami secara tekstual dan wilayah hadis yang dipahami secara kontekstual.²⁰ Munawir Syadzali dan Nurcholis Madjid juga telah mengembangkan metode pemahaman teks secara kontekstual dalam beberapa tulisannya.²¹

¹⁸ Kata *mutawātir*, menurut bahasa, adalah berturut-turut, adapun menurut istilah ulama hadis adalah “khabar yang disandarkan pada panca indra yang dikabarkan oleh sejumlah orang yang mustahil menurut adat mereka bersepakat untuk mengkabarkan berita itu denan dusta”. Sedangkan *ahad* sebagai jamak untuk kata *wahid*, yang arti harfiyahnya satu. Arti istilah menurut ilmu hadis ialah “Apa yang diberitakan oleh orang-seorang yang tidak mencapai tingkat *mutawātir*. Lihat penjelasan lebih lanjut dalam. T.M. Hasbi Ash-Shiedieqy, *Sejarah Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 200-226; Endang Soetari, *Ilmu Hadis: Kajian Riwayat dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 120.

¹⁹ Maksud *qaṭ'iy al-wurūd* atau *qoṭ'i as-subut* ialah absolut (mutlak) kebenaran beritanya. Sedang *zanniy as-subuṭ* ialah nisbi atau relative (tidak mutlak) tingkat kebenaran beritanya. Lihat lebih lanjut dalam al Adlabi, *manhaj naqdil matn* (Bairut: Dar al Afaq al Jadidah, 1983), hlm. 239. al-Syaṭibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syari'ah*, Juz III (Mesir: al Maktabah al Tijariyyah al Kubro, t.ṭ.), hlm. 15-16. dan al-Bahsanawi, *as-Sunnah al-Muftara 'alaiha* ([ttp]: Darul Buhus al-Ilmiyyah, 1979), hlm. 99-100. yang dikutip oleh M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 4

²⁰ Lihat selengkapnya. Yusuf Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadits-Hadits Nabi saw.*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 93-195

²¹ Lihat selengkapnya. Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 7

Secara khusus, penelitian ini diarahkan pada studi pemahaman Ibnu Taimiyyah terhadap hadis tentang kepemimpinan Quraisy. Dipilihnya tokoh ini didasari pertimbangan: *Pertama*, figur seorang Ibnu Taimiyyah yang menebarkan semangat reformasi di bidang pemikiran, teologi, maupun politik dan menentang fanatisme mazhab.²² *Kedua*, dalam hal metodologi, para peneliti menyimpulkan bahwa Ibnu Taimiyyah adalah seorang pemikir tekstualis, dalam arti selalu mendasarkan setiap simpulan-simpulan pemikirannya pada makna teks-teks keagamaan dan mengikuti tradisi-tradisi salaf.²³ *Ketiga*, Lingkaran prinsip dasar pemikirannya, adalah *ar-Ruju' ilā al-Kitab wa as-Sunnah*. Dalam keyakinan Ibnu Taimiyyah, al-Qur'an dan Sunnah Nabi pada prinsipnya telah mencakup semua urusan agama, termasuk dalam urusan politik. Sehingga ia menggagas konsep politik berdasarkan syari'ah, pun demikian, formulasi pemikiran politiknya tidak serta merta berarti harus menjadikan islam sebagai dasar negara yang formal.²⁴ *Keempat*, pengaruh pemikiran beliau yang cukup besar di belahan dunia Islam, khususnya dalam dinamika keilmuan di tanah air..

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa studi pemahaman Ibnu Taimiyyah terhadap hadis kepemimpinan Quraisy akan sangat menarik, karena kajian semacam ini tidak hanya memberikan wawasan keilmuan dalam bidang hadis

²² Dalam hal ini, Ibnu Taimiyyah melakukan pembaharuan dengan membuka kembali pintu akal, daripada hanya mengikuti pola yang sudah baku. Kepercayaan terhadap kemungkinan dan nilai pengetahuan syariah yang independen mempunyai pengaruh yang kuat pada doktrin Ibnu Taimiyyah dan merupakan pendukung semua langkah pembaruannya yang kontroversial. Perubahan paling penting yang menyangkut dengan metode itu adalah adanya rehabilitasi peranan ijtihad yang sering diartikan dengan ungkapan seseorang terhadap kecakapan dan kemampuan pribadinya untuk mencapai pengetahuan. Ijtihad dimaksudkan untuk menggantikan metode taklid yang amat membeo dan kaku. Taklid sendiri berarti mengadopsi segala keputusan yang ditetapkan oleh para penguasa. Lihat Nurcholis Madjid, *Khazanah Intelektual Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 38-45.

²³ Pendekatan Ibn Taimiyah terhadap teks ini sering dikecam sebagai terlalu tekstual sehingga ia sering disebut sebagai pelopor literalisme. Ini berawal dari prinsipnya yang menyatakan bahwa agama Islam tidak dapat dan tidak boleh dipahami kecuali dengan melihat dan memahami teks al-Qur'an dan Hadis secara apa adanya. Sikapnya ini ia landaskan pada common sense yang cukup kuat yaitu jika seseorang berspekulasi tentang agama, padahal agama adalah hak prerogative Tuhan melalui utusan-Nya, maka apa yang menjamin bahwa spekulasi itu benar mengingat bahwa kita hanyalah manusia biasa. Lihat Nurcholish Madjid, "Kontroversi Sekitar Ketokohan Ibn Taimiyah" dalam *KKA Paramadina*, seri ke-81, (Juli, 1993), hlm. 11.

²⁴ Jeje Abdul Rojak, *Politik Kenegaraan, Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1999), hlm. 4

tematik, mengingat kajian hadis tematik sampai sekarang masih menjadi persoalan yang cukup dilematis, baik berhubungan dengan otentisitasnya, maupun metode pemaknaanya, namun juga dapat memunculkan teori-teori pemahaman yang lebih akurat dalam mensikapi teks-teks tersebut lewat *frame* pemikiran sosok fenomenal Ibnu Taimiyyah. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan paradigma pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam memahami hadis kepemimpinan Quraisy di tengah suasana sejarah yang mengitari pemikirannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah melakukan kajian tentang hadis-hadis kepemimpinan dengan pendekatan studi tokoh Ibnu Taimiyyah kemudian menganalisis Bagaimana pemahaman Ibnu Taimiyyah terhadap hadis kepemimpinan Quraisy?

Agar pembahasan dapat dilakukan terarah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini fokus pada pembahasan Bagaimana metode pemahaman Ibnu Taimiyyah terhadap hadis kepemimpinan Qurais ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara spesifik adalah untuk mendeskripsikan metode pemahaman Ibnu Taimiyyah terhadap hadis kepemimpinan Quraisy dengan melihat faktor-faktor yang melatarbelakangi tipologi pemahamannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat temuan dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Temuan dalam skripsi ini memberi kontribusi baru dalam kajian metodologis hadis tematik kepemimpinan.
- b) Memperkaya khazanah pemikiran, khususnya diskursus pemahaman Ibnu Taimiyyah tentang hadis kepemimpinan.

- c) Mengasah nalar kritis atas teks-teks keagamaan, khususnya mengenai pemahaman hadis kepemimpinan Quraisy.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tentu saja bukan penelitian pertama kali yang mencoba mengkaji pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam memahami hadis Nabi. Terlebih hadis yang diangkat adalah hadis tentang kepemimpinan Quraisy, yang dalam kurun waktu cukup lama, mendapat perhatian besar dikalangan para ulama. Di kalangan ahli hadis sendiri, telah banyak buku-buku yang mengupas tentang hadis kepemimpinan Quraisy. Misalnya dalam bentuk kitab-kitab hadis, diantaranya terdapat dalam *Shahih al-Bukhārī*,²⁵ *Shahih Muslim*²⁶, dan *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*.²⁷ yang masing-masing berisi informasi awal tentang keberadaan hadis kepemimpinan Quraisy secara utuh dan penjelasan secara rincinya diuraikan dalam syarah kitab-kitab tersebut, akan tetapi sebatas pengetahuan penulis, penelitian yang membahas studi pemahaman Ibnu Taimiyyah terhadap hadis tentang kepemimpinan Quraisy adalah sesuatu yang baru. karena beberapa karya yang ditemukan justru lebih banyak membahas kajian pemikiran Ibnu Taimiyyah sebagai seorang tokoh pemikir Islam kontemporer atau mengangkat pemikiran politik Ibnu Taimiyyah secara umum.

Hanya saja perlu dikemukakan di sini, beberapa literatur yang membicarakan hadis kepemimpinan Quraisy misalnya:

1. *Beberapa Interpretasi Hadits al-A'immah Min Quraisy: Studi Hadis dengan Pendekatan Fiqh Siyasa*, karya Ahmad Khairuddin. Buku ini sebenarnya hasil dari penggabungan tesis dan disertasi pengarangnya yang mencoba melakukan analisis interpretasi para ulama tentang hadis kepemimpinan Quraisy dari aspek latar belakang mereka masing-masing,

²⁵ Abu Abd Allah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Juz IV* (t.tp.: Dar Muṭabi Syabi, t.ṭ.), h. 217-218 dan Juz IX, hlm. 77-78.

²⁶ Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim bi al-Syarh al-Nawawi* Juz XI (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.ṭ.) hlm. 201-202.

²⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* Juz II (Beirut: Maktabah al-Islami, 1976), hlm. 29, 93, 128, 129, 183, dan Juz IV, h. 421, dan 424.

dan kaitannya dengan konteks wacana khilafah. Ada banyak tokoh yang diangkat dalam buku ini, salah satunya Ibnu Taimiyyah,²⁸ namun justru karena banyaknya tokoh itulah, menjadikan pembahasannya terkesan sepotong-potong dan tidak tuntas, sehingga tidak bisa merepresentasikan gagasan pemikiran tokoh yang bersangkutan.

2. *Hadits-Hadits Politik*, karya Muhibbin. Dalam bukunya, Muhibbin sekalipun berusaha melakukan kajian kritis secara kesejarahan tentang hadis-hadis politik, dalam konteks waktu dan keadaan ketika hadis-hadis tersebut diucapkan.²⁹ Sekalipun dalam buku ini mengangkat pembahasan mengenai hadis-hadis kepemimpinan Quraisy namun tidak secara khusus membahas hadis kepemimpinan Quraisy dalam pandangan Ibnu Taimiyyah, sehingga pembahasannya tidak sampai pada studi pemahaman sebagaimana akan dijadikan objek penelitian penulis.
3. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*. Karya M. Syuhudi Ismail. Buku ini juga sedikit mengulas hadis tentang kepemimpinan Quraisy dengan mencoba mengungkapkan pemahaman baik secara tekstual maupun kontekstual, namun nampaknya Syuhudi Ismail pada saat mengungkapkan pemahaman hadis ini sebagaimana pemahaman simbolik Ibn Khaldun,³⁰ dan berpendapat bahwa ia bukan termasuk ajaran dasar islam yang dibawa Nabi, dan dipahami temporal saja. Artinya kepemimpinan umat islam bukan hak monopoli suku Quraisy secara tekstual, tetapi merupakan hak orang yang memiliki wibawa atau

²⁸ Ahmad Khoiruddin, *Op.Cit.*, hlm. 95-102

²⁹ Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 71-72.

³⁰ Nama lengkapnya 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Abd al-Rahman bin Khaldun. (732 H./1332 M.-808 H./1406 M.). Pemikiran politiknya tentang hadis kepemimpinan Quraisy terdapat dalam karya besarnya *Muqaddimat Ibn Khaldun*. Yang dimaksud pemahaman secara simbolik ialah sekalipun Ibn Khaldun mensyaratkan keturunan Quraisy sebagai kalifikasi calon pemimpin, namun ia hanya sebagai symbol atas kuatnya solidaritas yang dimiliki suku Quraisy pada saat itu, sehingga jika suku Quraisy dalam keadaan tidak lagi merupakan suku yang paling kuat, berwibawa, dan solidaritasnya tidak lagi dominan, maka kepemimpinan dapat berpindah ke suku-suku kelompok lain yang memiliki wibawa lebih besar dan solidaritas kelompok yang lebih kuat. Lihat Munawir Sjadzali, *Op.Cit.*, hlm. 90-98

kelompok yang dominan dan solidaritas kelompok yang kuat.³¹ Namun tulisan Syuhudi Ismail tidak menjelaskan pendapat tokoh secara detail, kecuali hanya sesekali saja. Sehingga dalam buku tersebut praktis tidak ditemukan kajian yang akan penulis angkat.

4. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme* karya Azyumardi Azra. Buku ini selintas menyinggung hadis kepemimpinan Quraisy yaitu pada saat mengulas Arabisme-nya al-Kawakibi.³² Namun oleh karena fokus pembahasan buku ini lebih kepada persoalan khilafah, maka tidak ada pembahasan yang lebih detail tentang interpretasi Ibnu Taimiyyah.
5. *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-wurūd*, karya Dr. Zuhad, dalam buku tersebut juga menyinggung sedikit pembahasan mengenai hadis kepemimpinan Quraisy yang mencoba melihat dari aspek *asbāb al-wurūd* hadis dan fungsinya sebagai pijakan pengembangan pemahaman hadis Nabi. Dalam ulasannya, hadis kepemimpinan Quraisy masuk dalam kategori hadis yang harus dilihat dari kaidah khusus *al-asbāb al-wurūd* nya. Disebutkan bahwa perlunya mencermati hadis tersebut disampaikan oleh Nabi dalam kapasitasnya sebagai seorang Nabi, atau sebagai kepala negara, karena masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Sampailah pada kesimpulan bahwa pada saat hadis-hadis itu dinyatakan, Nabi berada dalam fungsinya sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat, hal ini berdasarkan pada indikasi (*qarānah*) adanya ketetapan beliau yang bersifat primordial.³³ Namun dalam ulasan buku tersebut, juga sama sekali tidak menyinggung pemikiran Ibnu Taimiyyah.

³¹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 23-33

³² Menurutnya, gagasan al-Kawakibi mengenai nasionalisme Arab tidak bias dipisahkan dari pandangannya mengenai despotisme, dan dalam konteks membebaskan umat dari despotisme inilah dapat diungkap interpretasinya terhadap hadis kepemimpinan Quraisy yang merupakan solusi atas despotisme otokrat-otokrat “usmani atas dunia islam. Lihat selengkapnya dalam Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernism*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 30-38.

³³ Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbāb al-Wurūd*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011), hlm. 215-216

6. *Bagaimana Memahami Hadits-Hadits Nabi saw.* Terjemahan Muhammad al-Baqir, dari buku *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah al-Nabawiyyah*, karangan Yusuf Qaradhawi, Dalam buku ini Qaradhawi lebih memfokuskan diri pada penjelasan bagaimana memahami hadis Nabi, utamanya mengenai hadis-hadis yang sering terdengar di kalangan masyarakat luas. Salah satunya adalah pemahaman mengenai hadis kepemimpinan Quraisy. Ia berpendapat bahwa hadis ini berkaitan dengan keadaan kaum Quraisy pada masa Nabi, dikarenakan mereka mempunyai kekuatan dan kesetiakawanan kesukuan (*'ashābiyyah*) yang diperlukan sebagai sandaran kekuatan bagi kekhalifahan atau kekuasaan pemerintahan. Menurutnya, untuk dapat memahami interpretasi hadis ini, harus dipertimbangkan latar belakang situasi dan kondisi ketika diucapkan, serta tujuan pengucapannya. Sehingga untuk kondisi saat ini, hadis tersebut tidak bisa dimaknai secara harfiah.³⁴ Namun, dalam buku ini tidak sedikitpun membahas pemikiran Ibnu Taimiyyah.
7. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi* karya Suryadi juga mengangkat pembahasan singkat mengenai interpretasi hadis kepemimpinan Quraisy, hanya saja penulis buku ini sedang dalam upaya melakukan komparasi pemikiran antara Muhammad al-Ghazali dengan Yusuf Qaradhawi, sehingga penyebutan hadis kepemimpinan Quraisy hanya masuk dalam uraian contoh aplikasi saja, dari model pemahaman hadis Nabi menurut Qaradhawi.³⁵ Dengan demikian, pembahasannya sangat singkat dan sama sekali tidak menyebut tokoh sebagaimana dalam penelitian ini.
8. *ad-Daulah 'inda Ibn Taimiyyah* karya Muhammad Mubarak. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci pemikiran politik Ibn Taimiyyah, termasuk melakukan analisa atas karya Ibn Taimiyyah *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, yang menurutnya buku tersebut dimaksudkan untuk memberikan nasehat kepada para pemimpin daulah al-Mamalik yang notabene bukan dari suku

³⁴ Yusuf Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadits-Hadits Nabi saw.*, terj. Muhammad al-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), hlm. 93-102

³⁵ Suryadi, *Op.Cit.*, hlm. 164-167

Quraisy. Mubarak juga mengulas tentang pendapat yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyyah tidak mensyaratkan khalifah dari kalangan Quraisy, menurutnya, anggapan demikian salah, karena dalam karya yang lain, yakni *Minhāj as-Sunnah* disebutkan dengan gamblang Ibnu Taimiyyah mensyaratkannya.³⁶ Namun demikian, analisa Mubarak ini lebih menitik beratkan aspek latar belakang lahirnya dua karya Ibnu Taimiyyah, yakni *as-Siyasah* dan *Minhāj as-Sunnah* dengan latar belakang inilah, nampaknya Mubarak mengambil kesimpulan tentang bagaimana pemikiran politik Ibnu Taimiyyah khususnya mengenai hadis kepemimpinan Quraisy. Jadi jelas berbeda dengan objek kajian dalam penelitian ini.

9. Skripsi dengan judul *Hadis-hadis tentang Kepemimpinan dari Suku Quraisy : Studi Kritik Sanad dan Matan* karya Hendrik Imran, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang lulus tahun 2010 ini membahas validitas hadis berdasarkan sanad dan matannya, serta bagaimana makna yang dikandung hadis dengan mengadakan pemahaman secara sosio-historis ketika hadis tersebut muncul. Dalam pembahasannya, Hendrik hanya sedikit mengungkap contoh beberapa tokoh yang melakukan interpretasi atas hadis Kepemimpinan Quraisy, dan bukan tokoh Ibnu Taimiyyah.³⁷ Karena penelitiannya lebih menitik beratkan *setting* sosial ketika hadis ini muncul. Jadi praktis penelitian yang dilakukan tidak sampai pada pembahasan yang lebih komprehensif mengenai pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam merespon hadis kepemimpinan Quraisy.
10. Skripsi dengan judul *Metode Pemahaman Hadits Ibn Taimiyyah: Suatu Kajian Metodologis Terhadap Kitab as-Siyasah asy-Syar'iyah* karya Safrodin, mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo yang lulus tahun 1999. Dalam skripsi ini, secara khusus penelitiannya diarahkan pada bagaimana metode pemahaman hadis Ibnu Taimiyyah dengan menganalisis

³⁶ Muhammad Mubarak, *ad-Daulah 'inda Ibn Taimiyyah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 17 dan 23

³⁷ Hendrik Imran, *Hadis-hadis tentang Kepemimpinan dari Suku Quraisy : Studi Kritik Sanad dan Matan*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 49-71

kitab *as-Siyasah asy-Syar'iyah*. Sekalipun objek kitab yang dijadikan penelitian, merupakan kitab yang membicarakan politik, namun dalam skripsi ini tidak menyinggung sama sekali pandangan Ibnu Taimiyyah dalam merespon hadis kepemimpinan Quraisy. Hal ini wajar, dikarenakan kitab *as-Siyasah asy-Syar'iyah* memang tidak secara eksplisit memuat hadis kepemimpinan Quraisy. Temuan dalam skripsi yang cukup tebal ini adalah berkisar metode pemahaman hadisnya dalam kitab tersebut, yang menurut peneliti Ibnu Taimiyyah menggunakan pendekatan komprehensif-normatif, yakni sebuah upaya memahami hadis Nabi dengan mengaitkan dan menghimpunkannya bersama teks-teks keagamaan lainnya dalam satu kajian tematik yang komprehensif. Dan pendekatan kontekstual-historis, yakni sebagai upaya memahami hadis-hadis Nabi dengan mengaitkannya secara kritis-analitis pada konteks sejarah terjadinya (*asbāb al-Wurūd al-Hadīs*), baik secara umum, maupun secara khusus.³⁸

11. Skripsi dengan judul *Hadis Ahad menurut Ibn Taimiyyah* karya Arif Imanullah, mahasiswa Fakultas Ushulussin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang lulus tahun 2010 ini membahas kehujjahan hadis ahad menurut Ibnu Taimiyyah. Mengenal lebih jauh tentang aplikasi dan oprasionalisasi hadis terhadap praktek keagamaan pada masa Ibnu Taimiyyah, serta berusaha mengetahui implikasi dan konsekuensi pemikiran Ibnu Taimiyyah terhadap hadis ahad tersebut. Dalam uraiannya, penulis menjelaskan bahwa Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa wajib beramal dengan hadis ahad dengan terpenuhinya syarat sahih dan hasan. Jumbuh beragumentasi melalui ayat al Qur'an, atsar, dan ijma. Hal ini senada dnengan pendapat mayoritas ulama dalam memandang hadis ahad sebagai *zanni al-wurūd*, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa hadis ahad adalah *qat'i al-wurūd*. Namun demikian, penulis hanya sedikit

³⁸ Safrodin, *Metode Pemahaman Hadits Ibnu Taimiyyah: Suatu Kajian Metodologis Terhadap Kitab as-Siyasah asy-Syar'iyah*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin. IAIN Walisongo Semarang, 1999, hlm. 267

menjelaskan tentang hadis kepemimpinan Quraisy yang status hadisnya tergolong hadis *ahad*.³⁹

Selain buku-buku di atas, pembahsan hadis kepemimpinan Quraisy juga banyak dijumpai dalam literatur berbahasa arab mulai dari abad pertengahan hijriyyah sampai pada era kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan masalah politik islam secara umum, Namun dikarenakan kepemimpinan Quraisy hanya satu bagian dari wacana politik islam yang sangat luas, maka pembahasan atasnya terkesan hanya sekedarnya. Hal ini dapat dilihat diantaranya pada buku *al-Ahkām aṣ-Ṣulṭāniyyah* karya al-Mawaardi, dalam buku *al-Mugnī fī Abwāb at-Tauhīd wa al-‘Adl*, yang ditulis Qādhī Abd al-Jabbār, buku *Umm al-Qura* dan *Ṭab’iy al-Istibdāl wa Masyāri’u al-Isti’bād* karya al-Kawakibī, *al-Khilāfah au al-Imāmah al-Uzma* karya Muhammad Rasyid Ridha, buku *al-Fitnah al-Kubro* karya Thaha Husayn, *al-Khilāfah wa al-Mulk* karya al-Maududi, dan *Nizhām al-Mulk* karya an-Nabhani,⁴⁰ serta dalam *masterpiece*-nya Imam Syafi’i, *al-Umm* juga mengemukakan hak dan keutamaan suku Quraisy atas jabatan khalifah daripada suku-suku yang lain. Uraian yang agak rinci ditemukan dalam *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Dalam buku tersebut dengan panjang lebar Ibnu Khaldun berusaha untuk melakukan rasionalisasi hadis kepemimpinan Quraisy dengan mengatakan bahwa kepemimpinan Quraisy itu hanyalah bermakna simbolik.⁴¹

Setelah melakukan tinjauan pustaka, penulis dapat mengetahui posisi penelitian ini, yakni penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji pemikiran sosok Ibnu Taimiyyah.

F. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis berusaha untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga agar penelitian

³⁹ Arif Imanullah, *Hadis Ahad menurut Ibnu Taimiyyah*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hlm. 49-52

⁴⁰ Ahmad Khoiruddin, *Op.Cit.*, hlm. 11

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 112

tersebut dapat terarah serta mencapai hasil yang optimal, maka harus didukung dengan pemilihan metode yang tepat. Metode inilah yang akan menjadi kaca mata untuk meneropong setiap persoalan yang sedang dibahas, sehingga terwujud suatu karya yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan.

1. Jenis Penelitian

Karena objek penelitian ini berupa pemikiran seorang tokoh, yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, maka jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif.⁴² Metode yang digunakan juga menggunakan Metode Kualitatif, karena memiliki beberapa kemudahan, di antaranya lebih mudah menyesuaikan di lapangan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, dan metode ini menyajikan secara langsung hakikat peneliti dengan responden serta lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.⁴³ Selain itu, peneliti dapat mengenal lebih jauh dan mendalam mengenai sang tokoh, peneliti dapat merasakan apa yang dirasakan, dipikirkan, dan diucapkan sang tokoh dalam pergulatan dengan komunitasnya.⁴⁴

2. Sumber Data

Sumber penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu sumber pokok yang didapat dari buku-buku yang berhubungan atau berkaitan langsung dengan penelitian. Terkait dengan judul di atas ada beberapa buku yang dijadikan acuan primer dalam penulisan skripsi. Dalam hal ini penulis menggunakan buku Ibnu Taimiyyah, yakni kitab *Minhāj as-Sunnah fī naqdi kalām asy-Syī'ah wa al-Qadariyyah* dan *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah fī Iṣlāhi ar-Rā'ī wa ar-*

⁴² Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif; Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, terj. Muḥammad Shodiq dan Imam Muttaqien (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 4

⁴³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Edisi Revisi), (Bandung: PT. Rosda Karya, 2004), hlm. 9-10

⁴⁴ H. Arief Furchan, dan H. Agus Maimun, *Studi Tokoh; Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 16

Ra'iyah. Dua buku tersebut menjelaskan pemikiran Ibnu Taimiyyah dalam upaya merespon berbagai dinamika kehidupan islam, khususnya dalam bidang Hadis dan Politik.

b. Sumber Data Sekunder

Selain sumber data primer diatas, penelitian ini juga mengambil sumber data sekunder, yaitu sumber tambahan atau sumber pendukung yang juga berkaitan dengan penelitian tersebut. Data ini berupa kitab-kitab hadis dan buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut, juga buku-buku tentang pemikiran politik Ibnu Taimiyyah, baik dalam bentuk tulisan ilmiah, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, maupun dalam bentuk tulisan lepas di berbagai media, jurnal keilmuan, media cetak, maupun internet. yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah bentuk Penelitian Kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian melalui riset kepustakaan untuk mengkaji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum dipublikasikan.⁴⁵ Sehingga metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.⁴⁶ Dalam hal ini penulis berusaha mengambil, mengumpulkan data-data yang ada dalam perpustakaan sesuai dengan tema dan topik penelitian, yang fokus kajiannya adalah tentang hadis kepemimpinan Quraisy. Data yang diperoleh itu kemudian dituangkan dalam bentuk uraian dengan menggunakan metode penelitian hadis.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 10

⁴⁶ Suharsini Arikunto, *op.cit.*, hlm. 231

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁴⁷ Dari data-data yang telah terkumpul dalam langkah pertama selanjutnya diolah dengan menggunakan metode-metode analisis data sebagai berikut:

a. Metode deskriptif Analitis

Metode deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya.⁴⁸ Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data dengan menggunakan pembahasan yang beranjak dari pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus atau yang lazim dikenal dengan istilah deduksi. Hasil dari metode ini adalah mengungkap kerangka pemikiran hadis yang dituangkan oleh tokoh dalam karya yang menjadi obyek penelitiannya, untuk kemudian dilakukan analisis terhadapnya. Data deskriptif dianalisis menurut isinya. Oleh karena itu, analisis macam ini juga disebut analisis isi (*content analysis*).⁴⁹

b. Metode Hermeneutika⁵⁰

Dalam memahami pola pemikiran tokoh yang diangkat dalam penelitian ini, penulis juga mencoba menggunakan metode *hermeneutic reproduktif*.⁵¹ Pendekatan ini adalah pendekatan yang

⁴⁷ Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 102.

⁴⁸ Cf. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 63.

⁴⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offest, 1993), hlm. 85

⁵⁰ Hermeneutika dalam pengertiannya yang paling awal dirujukkan kepada dewa Yunani Kuno yang bernama Hermes, yang bertugas menyampaikan berita dari kayangan kepada manusia. Menurut Hossein Nasr, dalam perkembangan selanjutnya, dalam bahasa Yunani dikenal Hermeneuein yang artinya upaya menafsirkan atau menjelaskan serta menelusuri makna dasar kalimat yang tidak jelas, kabur dan kontradiktif bagi pembaca. Lihat selengkapnya, Sumaryono, S., *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisus, 1993), hlm. 23. adapun dalam pengertian yang umum, *hermeneutik* adalah sebuah instrument untuk mempelajari keaslian teks kuno dan memahami kandungannya sesuai dengan kehendak pencetus ide yang termuat dalam teks tersebut dengan *approach* sejarah.

⁵¹ Hermeneutika *reproduksi* pertama kali digagas oleh seorang folosof dalam filsafat wacana dan filsafat bahasa yakni friederich schleiermacher dan Wilhem Dilthey, lihat Dr. F. Budi Hardiman, *Teori-Teori Hermeneutika*, makalah disampaikan dalam pendidikan islam Emansipatoris P3M

bertujuan untuk memahami sebuah obyek tertentu dengan mempertimbangkan dua aspek dari obyek tersebut:

Pertama; Empati Psikologis, yakni penulis mentransposisikan dirinya sendiri ke dalam proses kreasi teks (hasil pikiran sang tokoh), yakni ke dalam perasaan-perasaan pengarang, kemudian menuliskan seutuhnya hasil transposisi itu. Hasilnya adalah potret kondisi psikologis tokoh dalam konteks sejarah tertentu.

Kedua; Empati Epistemologi, yakni penulis memahami makna simbol-simbol yang dihasilkan pengarang, sedekat mungkin memahami sesuai dengan intensi penghasilnya. Yang diempati disini adalah dunia mental mendesain karya-karya tokoh, seperti semangat zaman, tema-tema kolektif, dan warna pemikiran tokoh. Semua ini bertujuan untuk aktualisasi teks historis ke dalam kekinian.⁵²

c. Metode komparatif

Metode ini juga digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan beberapa segi pemikiran diantara para tokoh, maupun membandingkan beberapa metode pemikiran yang dipakai seorang tokoh dalam memahami sebuah teks, agar dapat ditemukan letak perbedaan dan persamaannya, sehingga kesimpulan akhir dari penelitian ini semakin jelas.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta adanya keterkaitan antara bab satu dengan bab yang lain, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Jakarta, tanggal 22 Mei 2003. tulisan ini disampaikan ulang dalam pendidikan History of Thought (HOT) USC, (Yogyakarta: Satunama, 2005), hlm. 37

⁵² Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm. 131.

Bab kedua, pada bab ini memuat landasan teori dari kegiatan penelitian yang akan membahas tentang kepemimpinan dalam perspektif hadis, yang lebih dahulu menjelaskan definisi kepemimpinan, definisi hadis, metode pemahaman hadis, dan pencarian hadis-hadis tentang kepemimpinan, dan selanjutnya adalah melakukan klasifikasi hadis-hadis tentang kepemimpinan.

Bab ketiga, bab ini merupakan penyajian data penelitian, yakni, Ibnu Taimiyyah dan hadis-hadisnya tentang kepemimpinan Quraisy. Yang meliputi pembahasan biografi Ibnu Taimiyyah, Latar belakang sosial dan Pendidikan, Aktifitas keilmuan dan Politik, Genealogi Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah, Hadis-hadis kepemimpinan Quraisy, serta Penjelasan Ibnu Taimiyyah terhadap hadis kepemimpinan Quraisy.

Bab keempat, merupakan analisis hadis kepemimpinan Quraisy dalam pandangan Ibnu Taimiyyah yang terbagi menjadi dua fokus penelitian utama: Metode Pemahaman Ibnu Taimiyyah terhadap Hadis Kepemimpinan Quraisy dan Latarbelakang Pemahaman Ibnu Taimiyyah terhadap Hadis-hadis Kepemimpinan Quraisy.

Bab kelima adalah penutup sebagai akhir dari seluruh proses kegiatan penelitian yang berisi kesimpulan, yang memuat hasil penelitian, saran-saran dari penulis yang terkait dengan pembahasan serta kata penutup sebagai akhir kata.